

PENINGKATAN KINERJA INSEMINATOR DALAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PETERNAKAN ERA OTONOMI DAERAH

Didik Kusumahadi dan Firman Jaya

PS. Produksi Ternak, Fak. Pertanian, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Abstract

Animal husbandry sector development plays an important role in fulfil the food from animal requirements by increase production continually to regional or national fulfilment in stamina of the food and economy. Various effort and increase production by improvement and development program, create opportunities for exertion, which have an impact to increase peoples income. It need human resource development is the most important for all activities like wise in animal husbandry sector. Improvment of human resourses competence expected to increase effectiveness and efficiency other resources that achieve the high productivity correlation with demand for global development, economic pressure result in situation change, technology and information development. It problem surmountable by develop learning organization. Animal Husbandry Service by husbandry sector development Nganjuk regency tried to create intitution as learning organization that intend to upgrade it role by implementation of accountable government of public administration. This effort can created by increase appararatus of Animal Husbandry Service competence that have rela tion with public service. It expected that have good governance to be carry out with can apply the principles of transpiration, participation, law supreme and public accountable. This result based SWOT analysis can be find out desicive factor (1). Husbandry commodity development by artificial insemination program that condusif public policy support, (2). Create condusif investation set the tone for husbandry sector, (3). Artificial insemination center has development as production regional by business partner system to realize income and prosperity of village communities, (4). Apply benefit technology to artificial insemination development in husbandry sector.

Key words: insemination, performance

Pendahuluan

Swasembada pangan yang khususnya berasal dari ternak, merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai dalam kegiatan peternakan di Indonesia. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan penataan sebagai akibat adanya perubahan struktur maupun fungsi kelembagaan pemerintah, serta hubungan antar struktur yang terjadi akibat otonomi daerah atas pemberlakuan Undang-Undang No 32

tahun 2004, tentang pemerintah daerah. Implementasi undang-undang tersebut memberikan harapan besar bagi setiap daerah didalam mengatur rumah tangganya sendiri, dalam meningkatkan pelayanan publik, disatu sisi diharapkan adanya peran masyarakat dan swasta yang dapat menggantikan peran pemerintah. Peranan pembangunan peternakan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Penataan pembangunan peternakan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pedesaan, peningkatan ketahanan pangan, dukungan terhadap peningkatan gizi masyarakat dan upaya memperoleh devisa, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan dibidang peternakan, mempunyai posisi strategis dan penting karena ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi dan politik. Pembangunan peternakan berorientasi agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia secara maksimal, yang akan menciptakan peningkatan ekonomi pedesaan (Kusumahadi, 1996).

Pembangunan peternakan di Kabupaten Nganjuk, didasarkan atas peluang pasar yang sesuai dengan sumberdaya lokal yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan peternakan yang dikembangkan berbasis pada segmentasi produksi, khususnya produksi bibit ternak sapi potong. Berdasarkan segmentasi tersebut didukung adanya peningkatan populasi diperlukan upaya dengan sumberdaya manusia yaitu tenaga inseminator yang profesional dalam mengelola kegiatan Inseminasi Buatan sehingga dapat menghasilkan tingkat kelahiran yang tinggi, berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani atau masyarakat pedesaan.

Pengembangan sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan di wilayah Kabupaten Nganjuk, berdasarkan pada agrosistem yang ada disetiap wilayah kecamatan. Selain aspek tersebut juga berorientasi pada stabilitas dan peluang pasar. Hampir semua komoditi peternakan dikembangkan, sedangkan yang dominan dan merupakan andalan daerah adalah sapi potong—untuk memasok kebutuhan

regional maupun nasional. Hal tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kuantitas maupun kualitas melalui program Inseminasi Buatan saat ini, bahwa Inseminasi Buatan merupakan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan budidaya dan berdampak pada penghasilan rumah tangga tani. Kondisi ini dikarenakan pengembangan ternak melalui Inseminasi Buatan dapat dikondisikan oleh manusia baik kuantitas maupun kualitas, sehingga sangat tergantung pada kinerja Inseminator. Kinerja keberhasilan inseminator di Kabupaten Nganjuk dapat digambarkan melalui:

- (a) Prestasi petugas (Inseminator), menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup baik 2,2 dosis/hari dengan jumlah inseminator sebanyak 56 orang petugas.
- (b) Sebagai indikator pelayanan untuk setiap ternak ditunjukkan dengan *Service per Conception* atau S/C, telah mencapai tingkat rata-rata 1,4 kali perlakuan.
- (c) Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan adalah dengan melihat *Conception Rate* atau CR, telah menunjukkan tingkat yang sangat baik yaitu 75,8%.

Selain aspek Inseminasi Buatan yang ditekankan dalam meningkatkan populasi melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit khususnya yang berhubungan dengan penyakit reproduksi yang didukung dengan peningkatan budidaya melalui penyuluhan. Dalam operasional kegiatannya Inseminasi Buatan, dipadukan dalam suatu kegiatan yang diwadahi dalam Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan terdiri atas kegiatan Inseminator, Medis Veteriner dan Penyuluhan. Tujuan penelitian ini untuk

meningkatkan sumber-sumber lain dalam pengembangan teknologi dan informasi bagi para inseminator.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehewan Kabupaten Nganjuk sebagai lokus, selama tiga bulan mulai bulan Nopember 2007 sampai Januari 2008. Pendekatan yang digunakan secara kualitatif dengan beberapa ciri yaitu: ditekankan melihat proses, pemahaman perilaku dan sikap serta persepsi tentang inseminasi, yang berdasar atas paradigma definisi sosial, terutama tindakan sosial aktor.

Data yang dipergunakan meliputi data primer yang berasal dari informan terpilih, dengan teknik wawancara mendalam atau *deep interview* kepada para inseminator, koordinator dan pengelola ditingkat kabupaten. Sampel inseminator sebanyak 50 sampel dengan populasi 200. Data sekunder ditelaah melalui laporan bulanan tiap wilayah kerja inseminasi buatan maupun laporan hasil rekapitulasi kegiatan seluruh wilayah kabupaten (Strauss dan Juliet Corbin, 1997).

Analisis data dilakukan secara prosedur kualitatif melalui proses pengkodean (*open coding*), pengkodean terpusat (*axial coding*) dan pengkodean terpilih (*selective coding*), serta pendekatan analisis SWOT sebagai pendekatan manajemen stratejik untuk mengetahui tentang peningkatan, pengembangan dan pengelolaan Inseminasi Buatan dalam rangka membangun kompetensi kinerja Inseminator untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam meningkatkan kualitas atau kinerja sumberdaya manusia, untuk

membangun kompetensi pelaku-pelaku dibidang peternakan, untuk meningkatkan populasi ternak melalui penerapan teknologi tepat guna dibutuhkan perubahan paradigma (Senge, 1990).

Fenomena yang nampak menunjukkan adanya motivasi yang holistik kepada para pelaku dibidang peternakan untuk berperilaku profesional dan mampu memecahkan masalah secara terprogram. Hal ini dilakukan melalui proses pembelajaran interaktif melalui penyegaran teknis dan *benchmarking*, upaya ini telah memberikan dampak yang signifikan, yang terlihat dari pencapaian indikator teknis yang meliputi pencapaian S/C dan CR yang cukup tinggi yaitu 1,4 dan 75,8%. Kondisi ini menunjukkan pencapaian yang melampaui standart regional maupun nasional. Fenomena ini selaras dengan kebijakan publik yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian bidang peternakan secara teknis yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Nganjuk. Kebijakan teknis yang diimplementasikan meliputi kebijakan pembibitan, penyediaan pakan ternak, penanggulangan penyakit, pemasaran dan pasca produksi. Kebijakan pembibitan ditekankan pada pemantapan pelaksanaan Inseminasi Buatan seperti yang terlihat dari fenomena pencapaian indikator teknis.

Pencapaian keberhasilan teknis tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja organisasi maupun lingkungan stratejik yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku Inseminasi Buatan. Faktor lingkungan stratejik yang mempengaruhi kinerja inseminator dapat digolongkan aspek internal yaitu kemampuan sumberdaya, efesiensi, efektivitas, produktivitas, struktur organisasi dan

kebijakan publik. Faktor eksternal meliputi perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik dan teknologi (Dunn, 1988).

Faktor internal sangat berperan dalam kehidupan organisasi terutama dalam pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh Dinas Peternakan kepada masyarakat khususnya pelayanan Inseminasi Buatan. Faktor eksternal berupa peluang tentang permintaan pasar tentang bibit ternak yang berkualitas terutama hasil dari Inseminasi Buatan, dan tantangan yang mempengaruhi pencapaian hasil dalam pengembangan peternakan terutama masih kurangnya tenaga teknis inseminator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara intensif seluruh wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan. Dari analisis faktor internal dan eksternal diperoleh hasil sebagai berikut (Withaker, 1995):

1. Faktor kekuatan utama adalah adanya peraturan dalam pengembangan dan peningkatan kegiatan inseminasi buatan yang didukung sumberdaya baik SDM yang profesional maupun pendanaan yang secara simultan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.
2. Faktor kelemahan adalah jumlah tenaga teknis yang kurang memadai jumlahnya dalam *mengcover* seluruh asektor yang ada di seluruh wilayah SPIB yang ada.
3. Faktor peluang utama pada pangsa pasar yang cukup terbuka, peluang ini yang mendorong inseminator beserta institusinya terus memacu implementasi teknologi terapan dibidang budidaya khususnya Inseminasi Buatan dan pencegahan penyakit reproduksi.

4. Faktor tantangan adanya kondisi ekonomi yang masih belum stabil khususnya ekonomi mikro yang menyebabkan tingkat pendapatan rumah tangga pedesaan kurang menguntungkan, sebagai dampaknya terjadinya penjualan ternak produktif, yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelahiran dan populasi ternak.

Berdasarkan analisis, kebijakan yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan institusi peternakan mencapai keberhasilan peningkatan populasi melalui peningkatan kinerja inseminator, peningkatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam program inseminasi buatan, peningkatan peran kelembagaan pedesaan sebagai wadah ekonomi, informasi dan belajar serta pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam secara optimal yang dapat dimanfaatkan untuk fasilitasi bidang peternakan (Mustopadijadja, 2001).

Kesimpulan

Keberhasilan pengembangan dan peningkatan sektor peternakan khususnya program Inseminasi Buatan didukung adanya sumberdaya (manusia dan alam) dan kebijakan publik yang mendukung perkembangan ekonomi mikro dan makro. Profesionalisme sumberdaya manusia melalui pendekatan pembelajaran dalam organisasi dapat mewujudkan otonomi daerah dengan implementasi Good Governance. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan dibidang peternakan harus berorientasi pada profesionalisme dan produktivitas usaha.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kehewan

Kabupaten Nganjuk dan semua pihak yang telah membantu dalam terlaksananya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Dunn, W. 1988. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Kusumahadi, D. 1996. Usaha Sapi Perah oleh Masyarakat Petani Hortikultura di Wilayah Batu. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Mustopadijadja, A. R. 2001. Manajemen Proses Kebijakan. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Senge, P. M. 1990. The Fifth Discipline. Doubleday Dell Publishing Group. Interaksara, Batam Centre.
- Strauss and Juliet Corbin. 1997. Basic of Qualitatif Research. Grounded Theory procedures and techniques, Penerjemah Djunaedi Ghony. Bina Ilmu. Surabaya.
- Withaker, J. B. 1995. The Government and Resuld Act of 1993. A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement. Educational Service Institute.

-Redaksi: Halaman ini sengaja dikosongkan-